

Dua Monolog tentang Demokrasi

Dodi Ambardi

Kita mungkin secara alami tak terlalu menyukai definisi, apalagi definisi yang bersifat teknis. Dan demokrasi, di tangan ilmuwan sosial dan politik, berubah menjadi sebuah definisi dengan sederet kriteria teknis yang terkesan penuh keruwetan soal pengukuran dan penghitungannya.

Salah satu artikel yang terkenal di kalangan ilmuwan dan mahasiswa pascasarjana di berbagai Jurusan Ilmu Politik adalah artikel *What Democracy Is ... and Is Not*, ditulis oleh Philippe Schmitter and Terry Karl pada awal 1990an. Artikel pendek ini beredar terus-menerus di komunitas akademik itu, dan mengajak orang untuk berpikir tentang kriteria apa yang seharusnya dimasukkan dalam sebuah definisi tentang demokrasi. Mereka yang berhasrat menjadi ilmuwan politik memanfaatkan artikel Schmitter dan Karl untuk berlatih debat tentang konsep demokrasi, dan kadang mengembangkannya sebagai nampun penyaring untuk mengklasifikasikan rezim-rezim politik di berbagai belahan dunia.

Ketika semua kriteria demokrasi dipenuhi, setiap kejadian demokrasi diperlakukan sebagai sebuah unit yang kemudian menjadi bagian dari keseluruhan populasi demokrasi. Dan populasi itu menjadi lahan untuk mengetes teori, mengapa demokrasi muncul dan tenggelam di wilayah yang berbeda-beda, serta untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong dinamika itu. Ratusan traktat telah dihasilkan dari proyek demokrasi ini.

Salah satu traktat penting dalam proyek ini dibikin oleh sekelompok ilmuwan yang saat itu masih bercokol di Chicago: Adam Przeworski dan kawan-kawan (2000), *Democracy and Development*. Lagi, dalam tim ini, perincian kriteria demokrasi ala Schmitter dan Karl ditetapkan. Insiden atau kasus demokrasi awalnya diukur melalui kategori polar, demokrasi atau *dictatorship*. Kalau satuan negara—demokratis atau diktatorial—dijadikan unit penghitungan, jumlah populasi demokrasi di dunia tidaklah banyak. Jumlah kejadian yang terlampau sedikit akan membatasi peluang untuk melakukan uji statistik terhadap berbagai faktor yang dipercaya sebagai sebab kemunculan demokrasi.

Mereka lantas mengajukan sebuah inovasi teknis dalam penghitungan kejadian demokrasi (Anda bisa mencemoohnya sebagai perumitan teknis belaka). Di masing-masing kategori, insiden demokrasi dan *dictatorship* dihitung per-tahun. Jadi, Filipina misalnya, akan menghasilkan hitungan 18 kasus demokrasi karena demokrasi mulai muncul di sana sejak tahun 1986, sampai 1990 ketika penelitian diadakan (empat kasus); dan kemudian ditambah 14, kasus demokrasi yang muncul pada periode 1950-1964. Tahun 1950 ditetapkan tim Przeworski sebagai tahun pertama untuk menghitung insiden demokrasi. Di antara dua periode demokratis itu, Filipina menyumbangkan 17 kasus *dictator-*

ship, yakni pada masa Ferdinand Marcos. Dengan inovasi teknis ini, insiden demokrasi dan *dictatorship* yang bisa diobservasi di dunia mencapai jumlah ribuan—sebuah jumlah yang cukup untuk melakukan beragam uji statistik

Dari banyak teori yang telah diterima umum, uji statistik yang dilakukan Przeworski dan kawan-kawan terhadap teori-teori itu memberikan banyak kejutan. Kita ambil, faktor tingkat pembangunan ekonomi yang diukur melalui rerata pendapatan individual setiap tahun, serta faktor agama yang dianut oleh penduduk suatu negara. Dua faktor ini mengilhami tesis utama dalam teorisasi tentang kemunculan demokrasi.

Kejutan pertama, Przeworski dan kawan-kawan menemukan bahwa tingkat pembangunan ekonomi tidaklah memunculkan demokrasi. Seharusnya, ketika *threshold* keberhasilan pembangunan dilampaui sebuah negara, demokrasi akan muncul sebagai akibatnya. Uji statistik tim Przeworski menolak tesis ini—tesis modernisasi di bidang politik yang diutarakan dengan jernih oleh Seymour Martin Lipset (1959). Namun benar, kata mereka, demokrasi lebih bisa bertahan pada negara-negara dengan penghasilan perkapita yang tinggi. Di titik ini mereka mengajukan pemisahan konseptual antara kemunculan demokrasi dan kestabilan demokrasi. Tingkat pembangunan ekonomi dipercaya sebagai faktor yang bertanggung jawab terhadap kestabilan demokrasi, tapi ia tak bersangkutan-paut dengan kemunculan demokrasi di berbagai negara.

Pada saat yang sama, hasil temuan mereka juga menunjukkan bahwa agama juga bukanlah penjelas yang bagus untuk menerangkan kemunculan demokrasi di Eropa dan Amerika. Kemunculan demokrasi, sebagian percaya, bersangkutan-paut dengan Kristen Protestan yang

menjadi agama mayoritas di wilayah tersebut. Ini disanggah pula oleh Przeworski dan kawan-kawan. Temuan mereka menyodorkan, bahwa agama, tak peduli itu Kristen Protestan atau Katolik, Islam, Hindu atau Budha, umumnya membawa *destabilizing effect* pada demokrasi maupun *dictatorship*.

Konseptualisasi tentang demokrasi, inovasi teknis penghitungan insiden demokrasi, dan temuan-temuan yang diajukan oleh Przeworski dan kawan-kawan tentu menghentak komunitas ilmuwan yang menekuni isu demokrasi. Kerja mereka menghasilkan perdebatan riu, menginspirasi kerja penelitian berikutnya, melahirkan kritik, dan menuai berbagai pujian. Mereka yang terlibat dalam riu rendah perdebatan itu mendemonstrasikan sebuah *passion*, elan yang diperlukan untuk membangun, mendebat, memfalsifikasi, dan menguji teori-teori demokrasi.

Adakah manfaat kerja jenis ini bagi sebuah perkembangan demokrasi? Goenawan Mohamad (GM) dalam esei panjangnya datang dengan argumen yang membikin masygul. Definisi, kalau kita memperlebar cakupan argumen GM, bukanlah pertarungan utama. Ketika tampil sebagai sebuah definisi, atau dalam bahasa GM demokrasi sebagai format, bukan saja demokrasi tak lagi inspiratif bagi kita semua, namun juga mematikan politik itu sendiri. Anasir perubahan yang berpotensi mengguncang tatanan politik dan sosial, dalam politik demokrasi dilunakkan. Perubahan radikal yang menyangkut tatanan pokok masyarakat dipermak menjadi perubahan yang sepotong-

sepotong, sehingga perubahan itu sendiri menjadi meredup dan hilang esensinya.

GM mengutarakan logika ini dengan menarik. Lahan pemilu demokratis di mana pun adalah sekumpulan pemilih yang terdistribusi dalam "kurva lonceng". Mayoritas mereka tinggal dalam gunung yang paling besar, di tengah, dan tak suka anasir perubahan yang bersifat ekstrem. Sebagai apapun ide perubahan itu, kalau ia tampil dengan wajah radikal, akan mental dalam pertarungan yang demokratis—pertarungan yang pemenangnya ditentukan oleh suara terbanyak. Karena itu, suara GM terdengar pesimistis tatkala menghitung peluang perubahan yang dibawa Obama. Ia pasti terantuk dengan logika kurva lonceng: Obama tak akan berani membalik pandangan dominan masyarakat Amerika yang pro-Israel, dan tak akan membawa Hamas ke meja perundingan.

Demokrasi kurva lonceng ini cocok belaka dengan imaji demokrasi yang digambar oleh para ilmuwan politik, yang dilabeli dengan istilah demokrasi prosedural. Ini label netral, yang dipakai ilmuwan politik untuk menengarai sebuah praktek demokrasi telah dijalankan di sebuah negara. Namun, kini ia menjadi peyoratif yang dilafalkan dengan nada ejekan. Ia menyerumpun dengan istilah demokrasi liberal, sebuah ide pembebasan yang kini banyak didiskreditkan karena justru dianggap kehilangan elan pembebasannya.

Meminjam GM: Apa gunanya pemenuhan kriteria prosedural jika dalam keseharian kita menyaksikan DPR yang korup, dan politik dijalankan oleh partai-partai yang tak jelas alasan hidupnya kecuali merebut kursi?

GM tak menampik demokrasi, dan tak hendak mengubur partai politik. Hanya saja, demokrasi prosedural tak

mencukupi untuk sebuah perbaikan, untuk sebuah cita-cita yang melampaui politik sehari-hari yang ribut melulu dengan hitung-menghitung kursi. Demokrasi sebagai format hanya menyediakan politik sebagai ritus yang menentukan menang-kalah secara numerikal. Karena itu, GM menginginkan jenis politik yang lain, yakni politik sebagai perjuangan. Memakai klise lama, kita memerlukan hadirnya orang-orang yang melihat politik sebagai panggilan.

Pandangan GM ini membawa konsekuensi yang jauh. Ia menentukan susunan prioritas, apa yang dianggap bernilai, kurang bernilai, dan tak bernilai. Kompromi, jalan tengah, dan konsensus adalah kebajikan bernilai tinggi dalam sejarah pertumbuhan demokrasi liberal. Metode ini menggantikan penyelesaian perbedaan politik yang sebelumnya ditentukan oleh tajamnya pedang dan runcingnya bayonet. Konflik dan perbedaan politik pada akhirnya bisa dikelola tanpa cipratan darah. Namun, dalam pandangan GM, dalam praktiknya, metode-metode penyelesaian perbedaan politik ini tak identik dengan kebajikan. Kompromi, jalan tengah, dan konsensus dalam demokrasi bisa berubah menjadi muslihat untuk membungkam apa yang dianggap menyimpang, *obscene*, dan menutup jalan bagi alternatif-alternatif politik baru.

Lalu bagaimana menembus konservatisme demokrasi prosedural yang massif ini? Tulisan GM ditutup dengan kalimat-kalimat berikut: "Satu-satunya jalan yang masih terbuka adalah selalu dengan setia mengembalikan politik sebagai perjuangan. Jalan yang ditempuh tak bisa dirumuskan

sebelumnya; selalu diperlukan keluwesan untuk memilih metode, baik melalui perundang-undangan atau justru melawan perundang-undangan, baik melalui partai ataupun melawan partai. Artinya, tiap kali kita membiarkan diri untuk didesak oleh panggilan akan keadilan yang tak pernah akan membisu."

Saya membayangkan, kritik dan proposal GM ini sampai di tangan Schmitter dan Karl, serta dibaca Przeworski dan kawan-kawannya. Dialog macam apa yang akan muncul dari pertukaran pandangan mereka?

Awal kerja Schmitter dan Karl, Przeworski dan kawan-kawan, adalah mencari deskripsi tentang sebuah gejala demokrasi. Deskripsi itu harus bertolak dari sejumlah kriteria yang ditetapkan secara konsisten dari satu kasus ke kasus lain. Pengertian demokrasi lantas dibakukan dan dibekukan. Demokrasi dibakukan agar konsep itu menjadi filter permanen untuk mengategorikan rezim politik, dan dibekukan karena ingin membuat kemunculan demokrasi sebagai gejala yang bisa diterangkan. Umumnya, teori hanya bisa berjalan jika hal yang mau dijelaskan bukanlah sebuah *moving target*.

Tujuan Schmitter, Karl, Przeworski dan kawan-kawan karenanya adalah membesut deskripsi dan menguji teori, apakah teori itu berhasil atau gagal menjelaskan sebuah gejala. Namun, di mata GM, deskripsi dan penjelasan tentang demokrasi bukanlah barang yang lebih berharga ketimbang memperjuangkan dan memperbaiki kualitas demokrasi itu sendiri. Kalau Schmitter es ingin membekukan demokrasi dalam sebuah konsep, GM ingin melumerkan definisi dan konsep demokrasi, dan menjadikan demokrasi sebagai sebuah kata kerja. Politik adalah perjuangan untuk senantiasa memperbaiki demokrasi. Schmitter berangkat dari

apa yang ada, GM mulai dari apa yang bisa dicapai; Schmitter bertolak dari penjarakan, sementara GM dari keterlibatan.

Jika metode kerja keduanya berbeda, kira-kira salah satu kemungkinan respon yang muncul dari kelompok Schmitter setelah membaca tulisan GM, "Mas Goen, kita siap mencatat, kita siap menjungkirkan teori-teori tentang demokrasi yang selama ini telah mapan, dan kita dengan senang hati menunggu sebuah sejarah baru."

Sampai ke kita, dua rute perjalanan ini ini bisa menjadi pilihan langkah. Apakah anda ingin menjadi pelaku sejarah atau pencatat sejarah? Tak banyak orang yang bisa meraih keduanya secara sekaligus***

"Yang Politis sebagai Nostalgia"

Robertus Robet

Setelah era gegap gempita penjatuhan Soeharto redup, kepolitikan dimaknai sebagai sebidang ruang pasti yang hanya bisa diperbaharui melalui penataan norma dan institusionalisasi. Ini berlangsung terutama karena banyak pihak memang dari awal mengambil sikap kompromi terhadap rezim lama. Konsensus sudah dicapai bahkan sebelum antagonisme dimulai. Kompromi terbesar dibuktikan dari diterimanya rezim kelanjutan dan pemilu yang ditawarkannya pasca penjatuhan Soeharto itu. Penerimaan dan kompromi itu, secara dramatis menginterupsi dan mengakhiri gairah reformis dalam menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih berarti.

Sejak itu, politik yang menyeruak dalam peristiwa sesaat yang melahirkan pembaharuan dalam sensasi universalitasnya berubah. Gairah berubah menjadi hukum, gerakan berubah menjadi prosedur, semangat berubah menjadi institusi, kontradiksi berubah menjadi konsensus